

ANALISIS SISTEM PENYALURAN BANTUAN KE DESA PADA LINGKUNGAN KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rayadi

Akademi Manajemen Informatika Panca Bhakti Pontianak
Jalan Sultan Abdurrahman No 8 Pontianak 78116
Email: rayadiluna@gmail.com

***Abstract:** Management or utilization of aid efficiently and effectively will be able to change the state of underdevelopment and low into the progress and higher. Management of grants must be really focused for poor areas and poor people. Poverty reduction programs in Indonesia is necessary to find a method of evaluation and appropriate monitoring so that the quality of the implementation of poverty reduction programs become better future will come and actually can be used as the basis of government programs to the welfare of society.*

***Keywords:** village aid distribution system, program aid flows village*

I. LATAR BELAKANG

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan pembangunan kompetensi SDM pada berbagai bidang, hal ini untuk membentuk bangsa yang mampu bersaing di dunia Internasional. Wilayah Indonesia saat ini masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, dan hal ini juga mengakibatkan potensi masing-masing daerah juga berbeda.

Pembangunan Negara Indonesia sedang dilakukan dengan harapan agar pembangunan ini dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tanggung jawab pembangunan bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat Indonesia. Peran serta

masyarakat dalam membangun bangsa dan Negara merupakan kondisi yang ideal dalam suatu tatanana berbangsa, demikian juga dengan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kategori tingkat pembangunannya masih tertinggal, konsekuensi sebagai daerah tertinggal maka pemerintah daerah provinsi harus melakukan tindakan pembangunan untuk mempercepat laju pertumbuhan perkembangan ini. Provinsi Kalimantan sendiri terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan kota, dan tingkat perkembangan masing-masing kabupaten/kota pun berbeda-beda. Dalam pelaksanaan program bantuan ini diperlukan adanya sistem pemerintahan yang sehat dan bersih. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan tujuan utama bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu untuk mencapai

tujuan tersebut diperlukan penerapan sistem pengendalian guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan tetap bersih. Penyelenggaraan yang bersih dapat diindikasikan dengan penyelenggaraan yang akuntabel, transparan dan berdaya guna .

Kinerja dan keberhasilan dari pemerintah sangat erat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan jika dikaitkan dengan penyaluran bantuan dana bergulir desa. Pada kebijakan ini partisipasi masyarakat sangat besar peranannya untuk kesuksesan program yang dilaksanakan, karena program kebijakan ini bergantung pada partisipasi masyarakat, pemerintah merupakan fasilitator, konsultan dan pengendali. Pengendalian dilakukan melalui pendampingan selama program dijalankan, melakukan konsultasi dan monitoring serta evaluasi program pada penyaluran dana bantuan desa.

Program penyaluran dana bantuan desa ini dalam implementasinya mengalami beberapa permasalahan lapangan yang tampak selama proses pencairan dana dan pengendalian program bantuan dana yang disebabkan oleh:

- a) Saat permohonan permintaan pendanaan dari Unit Pengelola Kegiatan tidak melalui verifikasi di tingkat kabupaten (Satker), sehingga pengeluaran dan penyaluran dana tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Desa.
- b) Pencairan dana bantuan untuk periode selanjutnya terhambat karena tidak adanya verifikasi dari pemerintah desa sebagai pengendali, dampaknya minimal 90% aktivitas penyaluran ke tiap Tim Pengelola Kegiatan di Desa, baru boleh melakukan pendanaan.

Berdasarkan PP 60 tahun 2014 menyebutkan, bahwa dana bantuan desa yang tata cara perhitungan ADD bersumber dari APBN. Dimana, indikator pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis yang ditentukan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi. Dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: Bagaimana sistem penyaluran bantuan ke desa pada lingkungan Kabupaten di Kalimantan Barat?. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran bantuan ke desa pada lingkungan Kabupaten di Kalimantan Barat.

II. KAJIAN LITERATUR

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia. Prespektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material melalui retribusi modal atau kepemilikan. Suatu proses pemberdayaan dengan demikian hendak dimaknai sebagai upaya untuk relasi asimetri tersebut. Sebagai sebuah operasi maka sangat jelas bahwa dalam diri pemberdayaan terdapat tendensi

untuk mendorong emansipasi atau membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai manusia bermartabat melainkan sebagai manusia hukuman, sebagai bangsa pengungsi, yang nasibnya ditentukan oleh manusia lain, bahkan bukan saja ditentukan tetapi juga dipermainkan (Dadang,dkk, 2003:57)

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2005:57-60).

Secara lebih lengkap menurut Dadang, dkk (2003:75), suatu perubahan memiliki maksud sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan bermakna kedalam yaitu : kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka, sama artinya dengan desakan untuk sebuah proses redistribusi sumber-sumber ekonomi.
- b) Pemberdayaan bermakna keluar yaitu sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi

ini bermakna *policy reform* (merubah kebijakan) yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi pada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan si miskin beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya tawar mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a) Pemberdayaan ekonomi yang berakar pada rakyat dan menuju kemandirian masyarakat.
- b) Tata social yang berkeadilan dan memihak rakyat.
- c) Pengembangan SDM yang berkualitas.
- d) Kelembagaan yang dimiliki masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.
- e) Tata politik yang demokratis dan partisipatif.
- f) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- g) Tata nilai pluralistic dan yang berkesetaraan gender.

Menurut Wardhani dan Haryadi (2004) ada 10 (sepuluh) langkah kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Identifikasi masyarakat miskin, Dengan metode “PWR” (*Participatory Wealth Ranking*) untuk mengenal lokasi, potensi dan sumber daya penduduk miskin.
- b) Identifikasi masyarakat miskin, Dengan metode “ABCD” (*Asset-based Community Development*) melalui pertemuan warga masyarakat untuk mengenali dan membuat perencanaan bersama masyarakat miskin berdasarkan asset yang dimiliki.

- c) Pembentukan kelompok usaha bersama, Dengan metode “CBED” (*Community-based Economic Development*). Untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang beranggotakan sekitar 15 sampai 30 keluarga dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan.
- d) Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota KUB, Dengan metode Androgogy (POD= Pendidikan Orang Dewasa) melalui proses saling belajar mengajar dengan bekerja bersama secara berkelanjutan.
- e) Memulai kegiatan KUB, Dengan metode “SHG” (*Self Help Group*) mendampingi musyawarah anggota kelompok untuk menentukan jenis usaha bersama yang disepakati dan bersama-sama menyusun rencana kegiatan untuk dilaksanakan dan dievaluasi hasilnya.
- f) Pengelolaan Usaha Bersama, Dengan metode “GG” (*Good Governance* = akuntabilitas, transparansi dalam keluarga dan masyarakat). Pendampingan anggota dan pengurus dalam pengelolaan usaha bersama melalui kemitraan dan rapat-rapat terbuka dan transparan.
- g) Pendanaan Masyarakat, Dengan metode “CSRO” (*Civil Society Resource Organization*) uang dimulai dengan kegiatan simpan pinjam untuk memimpin modal bersama dalam rangka dalam rangka melayani kebutuhan usaha anggota.
- h) Pembelaan Masyarakat Dengan metode “CRPR” (*Conflicts Resolution For Policy Reform*) agar kebijakan pembangunan memihak dan membela kepentingan rakyat miskin khususnya kaum perempuan.
- i) Kemitraan Lintas Pelaku, Dengan metode “PLED” (*Partnership For Lokal Economic Development*) kemitraan lintas pelaku pemberdayaan masyarakat antara pemerintah, sector bisnis dan organisasi non pemerintah (ORNOP/LSM) dengan masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi local perlu dilakukan bersama.
- j) Kemandirian Masyarakat, Dengan metode “CBS” (*Community-based Sustainability*) agar dukungan dan bantuan kepada si miskin mampu menumbuhkan keswadayaan untuk mencapai kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan.

Penanggulangan Kemiskinan

Mengapa terjadi kemiskinan? Mengapa seseorang atau sekelompok orang itu miskin? Jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ini banyak dan beraneka ragam. Kemiskinan misalnya yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II menfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian Negara tersebut sebagai akar masalahnya. Penduduk tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali diikuti dengan sikap apatisisme terhadap lingkungan (Kuncoro, 2007:131).

Sharp, *et. Al* (1996) dalam Kuncoro (2007:191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan itu muncul karena adanya ketidakseimbangan pada kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua,

kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan timbul sebagai akibat adanya perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dan seterusnya berakibat pada keterbelakangan. Pandangan ini dikemukakan oleh Rugner Nurkse (1953) seperti dikutip oleh Kuncoro, (2007:132); Suryana (2000:45) dengan kesimpulan “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Agar dapat keluar dari “lingkaran setan kemiskinan” bantuan dari pihak luar (bantuan luar negeri) merupakan alternatif terbaik. Pengelolaan atau pemanfaatan bantuan secara efisien dan efektif akan dapat mengubah keadaan “keterbelakangan dan rendah” menjadi “kemajuan dan tinggi”. Pengelolaan dana bantuan haruslah benar-benar tertuju bagi daerah miskin dan penduduk miskin. Jangan sampai terjadi dis-alokasi dan mis-alokasi (Suharto, 2005:35). Dalam konteks ini, program-program penanggulangan kemiskinan menjadi relevan dengan “pemutusan” lingkaran setan kemiskinan.

Kajian kemiskinan dari sudut theology adalah adanya suatu paham apakah kemiskinan yang menimpa seseorang merupakan suatu takdir atautkah timbul karena si manusia itu sendiri tidak berusaha

untuk tidak miskin. Kajian theology juga mempertanyakan apakah pengentasan kemiskinan tersebut menjadi kewajiban Negara atau kewajiban masing-masing individu untuk berusaha sendiri. Penulis berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban Negara, baik dilihat dari sisi moral, maupun amanat yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila kemungkinan dihilangkan. Namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan.

Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, dimana dan mengapa ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Salah satu keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasi target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dimana si miskin itu berada. Kedua, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profit kemiskinan. Profit kemiskinan dapat dilihat karakteristik-karakteristik ekonominya

seperti sumber pendapatan, pola konsumsi atau pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain-lain. Juga perlu diperhatikan profit kemiskinan dilihat dari karakteristik sosial budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Pembicaraan mengenai kemiskinan dapat meliputi berbagai aspek. Hal ini terjadi, karena adanya keterkaitan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Misalnya saja, kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekurangan modal, kekurangan gizi, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan perkapita yang rendah. Hubungan saling pengaruh antara berbagai aspek kemiskinan tersebut dapat langsung maupun tidak langsung dan dapat merupakan suatu lingkaran yang sulit dicari ujungnya. Dengan demikian tidaklah sulit untuk menduga bahwa kemajuan atau kemunduran dari aspek yang lain. Oleh karena itu untuk mengamati kemiskinan perlu adanya suatu ukuran atau indikator tertentu. Karena kemiskinan muncul tidak saja disebabkan oleh kedudukan dan perilaku masing-masing individu, tetapi juga kedudukan dan perilaku masing-masing individu, tetapi juga kedudukan dan perilaku kelompok yang bersangkutan (Tadaro, 2004).

Kuncoro (2007:44) mengusulkan pula pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel-variabel non keuangan (*non-financial variables*), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka

kematian balita dan ibu melahirkan, tingkat kemiskinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain-lain.

Ditengah upaya untuk semakin menajamkan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu dicari metode evaluasi dan monitoring yang tepat agar kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi semakin baik dimasa akan datang. Dengan indikator-indikator yang objektif dan terukur para pengambil keputusan menjadi lebih mudah melakukan kebaikan-kebaikan dan berbagai segi agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebihberkelanjutan (*sustainable*) dan tidak bersifat *charity*. Dengan demikian kegagalan suatu program dimasa lalu bukan berarti telah gagal dalam segala aspeknya sehingga harus diganti dengan program baru, pengalaman selama ini menunjukkan kecenderungan bahwa jika suatu program dianggap telah gagal berarti itu dianggap perlu dibahas lagi dan perlu program baru untuk mengganti program lama.

Penelitian ini merupakan uji coba metode ESCAP (*Economic and Social Commission for Asian and Pasific*) yang digunakan untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan secara kuantitatif. Metode ESCAP ini sudah pernah dipakai di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002. Program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi kelanjutan program Impres Desa Tertinggal (IDT) yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) yang keduanya dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employmen Program*), dan proyek pengembangan Fisik dalam program

PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Program*).

III. METODE

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian studi kasus, artinya kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan untuk obyek yang diteliti yaitu Analisis Sistem Penyaluran Bantuan Ke Desa Pada Lingkungan Kabupaten di Kalbar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan tersedia. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian yang berupa laporan Pemerintah Kabupaten tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Artinya pengumpulan data yang berasal dari catatan yang telah tersedia dari pihak instansi yang berupa laporan penyelenggaraan, laporan keuangan, dan catatan.

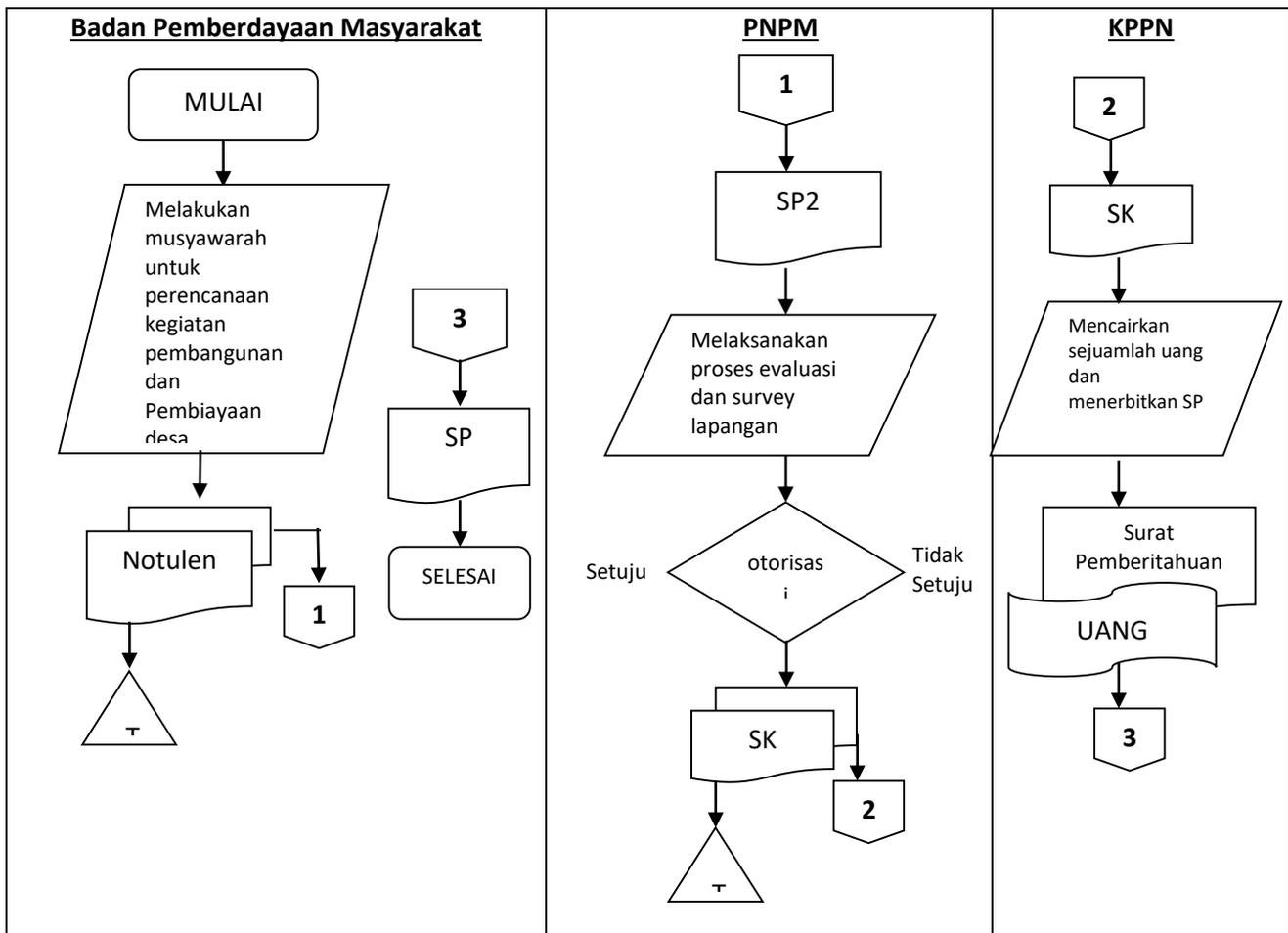
Analisis data sesuai pendapat Miles dan Huberman (Emzir, 2010:82) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

- a) Reduksi Data, Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b) Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

- c) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan, Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

IV. PENYAJIAN DATA



Gambar 1. Bagan Alir Sistem Penyaluran Dana Bantuan

Ket: RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), SP (Surat Pemberitahuan), SK (Surat Keputusan)

V. DISKUSI

Pengelolaan atau pemanfaatan bantuan secara efisien dan efektif akan dapat mengubah keadaan “keterbelakangan dan rendah” menjadi “kemajuan dan tinggi”. Pengelolaan dana bantuan haruslah benar-benar tertuju bagi daerah miskin dan penduduk miskin. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu dicari metode evaluasi dan monitoring yang tepat agar kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi semakin baik dimasa akan datang dan benar-benar dapat dijadikan sebagai dasar dalam

program pemerintahan guna mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan, merancang kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, karena hal ini dipandang perlu untuk keberlanjutannya, hal ini juga mempertimbangkan karena memberikan bantuan pada masyarakat seharusnya berdasarkan kebutuhannya. Peraturan Menteri Keuangan merupakan wujud komitmen pemerintah dengan mengalokasikan sebagian APBN yang juga didampingi dengan APBD untuk menanggulangi kemiskinan pada daerah

yang dianggap layak mendapatkan bantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui PerMen. Keu No 168/PMK.072009 tentang Pedoman Pendanaan bersama Untuk Daerah Tertinggal dan Penanggulangan Kemiskinan.

Bentuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan memajukan desa tertinggal, ada berbagai macam antara lain, Bantuan Langsung Masyarakat, Penyediaan Prasarana Air bersih, bantuan simpan pinjam pada kelompok masyarakat, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Bantuan langsung masyarakat harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tujuan, karenanya mulai tahap perencanaan diharapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada saat pelaksanaannya harus dapat dikontrol agar tidak menyimpang dari tujuan program kegiatan yang diharapkan.

Untuk itu dilakukan analisis bagan alir sistem penyaluran dana bantuan ke Desa untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan program pemerintahan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan tingkat perekonomian masyarakat desa. Tujuan yang lain analisis ini adalah untuk menguraikan penghambat (jika ada) ketidak konsistenan pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Analisis Bagan Alir Sistem (*Flowchart*)

Bagan alir sistem adalah suatu bagan simbolik yang menunjukkan suatu proses bisnis yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten. Evaluasi terhadap bagan alir sistem ini digunakan untuk mengetahui bagian yang terkait, dokumen yang digunakan dalam program pembangunan dan pembiayaan desa yang dilaksanakan.

Untuk itu dalam hal menjawab permasalahan pertama yang dihadapi penulis yaitu mengenai sistem penyaluran dana bantuan ke desa pada Lingkungan Kabupaten, maka penulis menggunakan analisis flowchart untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan telah mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan teknis lapangan dalam proses pembangunan dan penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan dana ke desa telah memenuhi standar pengendalian dan peraturan yang berlaku.

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa tertinggal adalah sebagai berikut: 1)Notulen Rapat/Musyawarah; 2)RKA (Rencana Kegiatan Anggaran); 3)Surat Keputusan; 4)Surat Pemberitahuan; 5)Laporan penerimaan bantuan (khusus Simpan Pinjam kepada anggota kelompok); 6)Laporan Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana; dan 7) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Adapun bagian yang terkait dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat. Badan ini dibentuk oleh masyarakat dengan anggota masyarakat desa pada masing-masing kecamatan. Badan Pemberdayaan masyarakat merupakan badan yang berfungsi pokok sebagai badan/wadah perencana kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat desa setempat dan berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana desa setempat. Lembaga ini juga diharapkan akan dapat melaksanakan rencana kegiatan yang disepakati direncanakan oleh badan tersebut.

- 2) Bagian Pemerintah Desa pada BPMPD, PP dan KB. Bagian ini sesuai dengan TUPOKSI nya adalah bertanggung jawab atas urusan pembinaan pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan program PNPM Mandiri.
- 3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan program PNPM oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- 4) Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPD, PP dan KB). Bagian ini merupakan salah satu bagian pada BPMPD, PP dan KB yang secara kusus sesuai TUPOKSI bagian bertanggung jawab atas verifikasi setiap pertanggung jawaban kegiatan yang dilakukan BPM pada masing-masing Desa di lingkungan Kabupaten.

Analisis Sistem Berjalan

Badan Pemberdayaan Masyarakat mulai melakukan musyawarah untuk membicarakan mengenai rencana pembangunan dan pengembangan kesejahteraan desa yang akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari dana bantuan penanggulangan desa tertinggal yang dilaksanakan dalam program pemerintah daerah Kabupaten. Musyawarah dilakukan untuk membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan program pembiayaan dan menentukan jumlah kepala

keluarga yang berhak untuk menerima bantuan berupa uang santunan, kemudian setelah rapat selesai dilakukan maka hasil notulen rapat akan diserahkan kepada Pemerintah Desa, dan rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

Setelah itu PNPM baru akan memberikan otorisasi terhadap SP2 yang dibuat untuk pencairan dana bantuan desa tertinggal tersebut. Jika surat otorisasi tidak disetujui maka akan dilakukan proses ulang dalam survey dan penanggulangan di lapangan namun jika disetujui akan diberikan surat otorisasi berupa keputusan bahwa akan dilakukannya pembiayaan bantuan bagi desa di lingkungan tersebut yang di programkan. Kemudian Surat Keputusan tersebut dikirimkan ke KPPN untuk pencairan dana dan penerbitan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi Pemerintah Desa penerima bantuan.

Pemerintah Desa menerima surat pemberitahuan dari PNPM beserta dana bantuan yang dikeluarkan untuk pembiayaan desa. Kemudian Pemerintah Desa akan menerbitkan tembusan dari surat pemberitahuan untuk diberikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi daftar nama penerima bantuan dan program pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bantuan guna pengembangan kesejahteraan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat menyalurkan dana bantuan kepada warga calon penerima bantuan sekaligus melakukan penyuluhan kerja sama untuk pembangunan desa berdasarkan arahan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, setelah pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan maka akan dibuatkan pertanggungjawabannya sebagai bentuk dari

adanya kinerja pelaksanaan program mandiri serta untuk mengontrol pengendalian penyaluran bantuan desa.

Pada tahap perencanaan ini prosesnya cukup lengkap sehingga program kegiatan yang dipilih dan dianggap layak, serta sasaran desa dan masyarakat yang akan dibantu dapat memenuhi tujuan yang diharapkan oleh pengadaan program ini. Pada Tahap perencanaan pemilihan kegiatan berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang akan menjadi sasaran program sehingga tidak ada program yang mubazir atau tidak berguna bagi masyarakat, dan tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Proses perencanaan yang berbasis *Bottom up* (ide kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat) dengan bentuk program Bantuan Langsung Masyarakat dan bantuan Simpan Pinjam untuk membantu meningkatkan kapasitas Ekonomi keluarga belum sejahtera. Bantuan Langsung berupa pengadaan sarana dan prasarana maupun Simpan Pinjam dilakukan evaluasi dan studi kelayakan sasaran cukup baik pelaksanaannya karena sudah dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan pihak penyandang dan (PNPM), pemerintah (BPMPD, PP dan KB) selaku pengendali dan masyarakat sebagai pihak *stakeholder* atau yang membutuhkan.

Analisis Sistem Penyaluran Bantuan

Analisis sistem penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam pembiayaan yang menjadi program pemerintah dalam perbaikan tatanan kesejahteraan desa-desa miskin agar mendapat perhatian dan dapat berkembang

sebagaimana perkembangan pemerintahan saat ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Ketentuan penyaluran PNPM Mandiri berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta Simpan Pinjam pada Kelompok-kelompok yang potensial untuk dikembangkan guna peningkatan Perekonomian keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan bagi desa dilaksanakan secara berkala untuk dapat memberdayakan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Masyarakat penerima bantuan adalah desa yang sebagian besar warganya kurang mampu dan Pemerintah Desa. Pada proses penyaluran ini pelaksanaannya di damping oleh tim fasilitator dari pemerintah kecamatan setempat, sehingga penyimpangan penyaluran dapat ditekan atau tidak terjadi.

Kriteria warga dan desa penerima bantuan ditentukan melalui peninjauan lapangan secara langsung oleh pengelola kegiatan untuk mendata warga maupun desa yang masih memerlukan bantuan dan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan, dengan demikian penyaluran dana yang diberikan telah memberikan manfaat yang optimal dalam pengembangan daerah.

Setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan dibuatkan pertanggungjawabannya atas kinerja penyaluran bantuan yang diberikan, selalu dilakukan verifikasi oleh fasilitator yang ada di kecamatan masing-masing. Hal ini merupakan pengendalian untuk pelaksanaan, karena

pelaksanaan tanpa pertanggung jawaban maka akan dapat memicu terjadinya penyimpangan penggunaan dana ataupun sasaran program.

Pertanggungjawaban ini berupa Laporan, yaitu laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh ketua proyek, laporan realisasi penggunaan dana yang dibuat oleh bendahara kegiatan untuk dikirim ke masing-masing kecamatan. Selanjutnya Unit Pelaksana Kegiatan kecamatan melakukan rekapitulasi laporan dari masing-masing desa untuk disampaikan ke tingkat Kabupaten. Setiap laporan dilakukan verifikasi oleh fasilitatornya untuk bantuan Simpan Pinjam, sedangkan untuk yang bersifat fisik melibatkan konsultan.

Laporan realisasi keuangan yang diverifikasi oleh UPK kecamatan masing-masing, yang biasanya diketahui oleh Badan Kelompok Antar Desa. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan agar ada jaminan bahwa proses penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban ini dibuat untuk dapat mencairkan dana bantuan berikutnya pada termin yang akan datang, akan tetapi laporan yang dibuat tidak diverifikasi oleh Pemdes dan langsung diserahkan oleh pengelola teknis ke Pemda dengan demikian pencairan berikutnya jadi terlambat dan memerlukan waktu yang lama untuk itu dibuatkan kebijakan pencairan dana secara kolektif untuk beberapa desa sekaligus sehingga pengendalian dapat dilakukan secara objektif melalui evaluasi dan perbandingan pelaksanaan kegiatan pembiayaan di lapangan. Dari ini semua dapat dikatakan bahwa sistem yang diterapkan dalam penyaluran bantuan ke desa di lingkungan Kabupaten telah

memenuhi standar dalam sistem pembangunan yang ditetapkan dan diharapkan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan realisasi yang dibuat oleh bendahara kegiatan dan telah di verifikasi oleh UPK kecamatan bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol penggunaan dana baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun simpan pinjam selama proses penyalurannya. Demikian juga pada tahap pencairan dana tahap berikutnya selalu didahului laporan pemanfaatan dana sebelumnya dan dilakukan verifikasi oleh yang berwenang hal ini dimaksudkan jika terjadi pencairan dana tahap berikutnya memang dibutuhkan. Secara ketentuan teknis bahwa setiap tahap pencairan maka penggunaan dan sebelumnya harus sudah mencapai 90%, namun verifikasi dapat memverifikasi karena beberapa pertimbangan, misalnya karena jarak tempuh pelaporan jauh dari ibu kota Kabupaten.

VI. SIMPULAN

Sistem penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan dalam program pemberdayaan masyarakat. Program pemerintah melalui penyaluran bantuan desa dilaksanakan berdasarkan sistem pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penerima bantuan. Pengelolaan teknis kegiatan dalam penyaluran bantuan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan bertanggungjawab terhadap tugas yang dijalankannya. Anggaran bantuan bagi desa diberikan kepada desa dan kepala warga yang berhak serta kurang mampu atas usulan pemerintah desa sebagai kepala pengendali kegiatan penyaluran bantuan.

Pelaksana teknis kegiatan penyalur bantuan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan adil dalam pemberian dana bantuan bagi warga maupun desa yang memerlukan. Penyaluran bantuan desa dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam program pembiayaan oleh Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki., 2001, *Intermediate Accounting*, Edisi VII, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Bastian, Indra., 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : BPFU UGM.
- Dadang J., dkk., 2003, *Politik Pemberdayaan, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, Jakarta: Lappera.
- Emzir., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Indrajit, RE., 2000, *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: UGM Press.
- Indriyaantoro, Nur dan Bambang Supomo., 2002, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : BPFU UGM.
- Jogiyanto, Hartono., 2008, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta : Andi offset
- , 2009, *Analisis Dan Disain Sistem Informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis*, Yogyakarta : Andi offset
- Kuncoro, Mudrajad., 2007, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi offset.
- Mulyadi, 2008, *Sistem Akuntansi*, Edisi ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari., 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi., 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana., 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno Hadi., 2004, *Metodologi Research*, Jilid 3, Yogyakarta : Andi offset.
- Todaro, Michael., 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- Wardhani, Anwar dan M Haryadi, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, TKP3KPK*, Menko kesra, Jakarta
- Yuwono, Sony, *et.al.* 2007, *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard*, Jakarta: PT. Gramedia. *Pustaka Umum*.
- , Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Bandung: Citra Umbara.
- , Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah, Bandung : Citra Umbara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Aset Pemerintah Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

-----, Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.